

Research Article

Reorientasi Kebijakan Luar Negeri Negara Berkembang dalam Menyikapi Ketegangan Ekonomi antara Amerika Serikat dan Tiongkok

Asep Setiawan¹

1. Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia; asep.setiawan@umj.ac.id

Corresponding Author, Email: asep.setiawan@umj.ac.id (Asep Setiawan)

Abstract

Ketegangan ekonomi yang terus meningkat antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah menciptakan tantangan signifikan bagi negara-negara berkembang dalam menentukan arah dan posisi kebijakan luar negeri mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana negara-negara berkembang melakukan reorientasi kebijakan luar negeri dalam merespons rivalitas dua kekuatan global tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research), penelitian ini mengkaji literatur akademik, laporan kebijakan luar negeri, serta publikasi internasional untuk mengidentifikasi pola-pola respons yang muncul. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi hedging menjadi pendekatan utama negara berkembang dalam menjaga keseimbangan hubungan dengan kedua negara adidaya, diikuti dengan diversifikasi mitra ekonomi dan diplomatik guna mengurangi ketergantungan pada satu pihak. Selain itu, konsep strategic autonomy, penguatan kerja sama regional, serta peningkatan kapasitas diplomatik dan intelijen ekonomi juga menjadi bagian dari strategi reorientasi yang dilakukan. Reorientasi ini menandai pergeseran dari diplomasi berbasis ideologis ke arah diplomasi pragmatis yang lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi dan pembangunan nasional. Temuan ini menunjukkan bahwa negara berkembang bukan lagi sekadar objek dalam sistem internasional, melainkan aktor strategis yang mampu menavigasi tekanan geopolitik melalui kebijakan luar negeri yang adaptif dan dinamis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi kajian hubungan internasional serta menjadi referensi dalam perumusan kebijakan luar negeri negara berkembang di tengah dinamika ketegangan global.



Keywords: Kebijakan Luar Negeri; Negara Berkembang; Amerika Serikat; Tiongkok; Ketegangan Ekonomi.

INTRODUCTION

Dalam dua dekade terakhir, konstelasi global mengalami pergeseran signifikan akibat meningkatnya rivalitas ekonomi antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, yang tidak hanya memengaruhi struktur ekonomi global, tetapi juga berdampak langsung pada konfigurasi kebijakan luar negeri negara-negara berkembang (MacDougall, 2017; Zakaria, 2020). Rivalitas tersebut ditandai oleh perang dagang, persaingan teknologi, dan konflik geopolitik yang memunculkan tekanan bagi negara-negara berkembang untuk menentukan posisi strategis mereka di antara dua kekuatan besar dunia (Baldwin, 2016; Ikenberry, 2020).

Negara berkembang, khususnya di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin, menghadapi dilema diplomatik antara mempertahankan hubungan ekonomi dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang utama, atau menjaga hubungan keamanan dan politik dengan AS (Diptyana et al., 2022; Reilly, 2013). Dalam situasi ini, muncul kebutuhan mendesak bagi negara-negara tersebut untuk melakukan reorientasi kebijakan luar negeri guna menyesuaikan dengan dinamika global yang terus berubah (Acharya, 2018).

Namun demikian, penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana negara berkembang melakukan penyesuaian atau reorientasi kebijakan luar negeri dalam konteks ketegangan AS-Tiongkok masih terbatas (Haass, 2021). Kebanyakan studi berfokus pada dampak ekonomi global (Stiglitz, 2017), perang dagang (Evenett & Fritz, 2019), atau diplomasi bilateral, namun belum banyak yang membahas secara mendalam strategi kebijakan luar negeri negara berkembang sebagai respons terhadap rivalitas dua negara adidaya ini (Friedberg, 2022). Inilah yang menjadi research gap dalam kajian ini.

Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya ketidakpastian global dan perlunya negara berkembang untuk memiliki strategi kebijakan luar negeri yang adaptif, tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga strategis (Murphy, 2017). Ketidaksiapan dalam merespons dinamika ini berpotensi memperlemah posisi tawar negara berkembang dalam forum internasional dan menyebabkan ketergantungan yang tidak seimbang terhadap salah satu pihak (Kurecic, 2017).

Beberapa penelitian terdahulu seperti karya (Nye, 2020) menekankan pentingnya smart power dalam diplomasi global, sementara (Baruah, 2022) menganalisis posisi India dalam dinamika Indo-Pasifik. Akan tetapi, studi-studi tersebut lebih banyak berfokus pada negara dengan kapasitas diplomatik menengah hingga besar. Padahal, negara berkembang dengan kapasitas terbatas juga turut terdampak dan perlu dirumuskan pendekatan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik domestik dan regionalnya (Kurlantzick, 2016).

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pendekatan analitis yang mengaitkan dinamika global makro antara AS dan Tiongkok dengan strategi mikro kebijakan luar negeri negara berkembang, serta memberikan kerangka konseptual reorientasi kebijakan luar negeri berbasis keseimbangan pragmatis antara kepentingan nasional dan tekanan global (Baylis et al., 2020).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pola-pola reorientasi kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh negara berkembang dalam menyikapi ketegangan ekonomi AS-Tiongkok, serta mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi proses reorientasi tersebut. Adapun manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi akademik terhadap studi hubungan internasional, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi pembuat kebijakan luar negeri di negara berkembang untuk menghadapi tantangan geopolitik kontemporer secara lebih strategis dan terukur.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur (*library research*) untuk mengeksplorasi reorientasi kebijakan luar negeri negara berkembang dalam menyikapi ketegangan ekonomi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika hubungan internasional secara mendalam melalui penelusuran terhadap teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan (Creswell & Poth, 2016). Studi literatur juga memungkinkan analisis kritis terhadap berbagai sumber data sekunder guna memperoleh pemahaman yang komprehensif atas respons strategis negara berkembang terhadap rivalitas dua kekuatan besar dunia (Zed, 2008).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari literatur yang relevan seperti buku akademik, artikel jurnal ilmiah, laporan kebijakan dari lembaga internasional (misalnya IMF, World Bank, ASEAN), serta publikasi resmi pemerintah dan organisasi *think-tank* yang kredibel. Kriteria pemilihan literatur didasarkan pada relevansi topik, aktualitas (diterbitkan dalam rentang 10 tahun terakhir), dan reputasi penerbit. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap basis data ilmiah seperti Scopus, JSTOR, ScienceDirect, dan Google Scholar, dengan menggunakan kata kunci seperti "*foreign policy reorientation*", "*US-China rivalry*", "*developing countries diplomacy*", dan "*geopolitical strategy*" (Booth et al., 2003).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) secara tematik, yakni mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan tema-tema utama yang muncul dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan (Krippendorff, 2018). Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana yang dijelaskan oleh (Ridder, 2014). Analisis dilakukan dengan mengacu pada kerangka teoritis dalam studi hubungan internasional, termasuk teori realisme, neoliberalisme, dan konstruktivisme, guna menafsirkan strategi diplomatik negara berkembang dalam konteks kontestasi global antara AS dan Tiongkok. Dengan demikian, metode ini memungkinkan pemahaman yang mendalam dan holistik atas pola reorientasi kebijakan luar negeri dalam situasi geopolitik kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Hedging sebagai Pilihan Utama

Negara berkembang cenderung mengadopsi strategi hedging sebagai respons terhadap ketegangan antara AS dan Tiongkok. Strategi ini memungkinkan negara-

negara tersebut untuk tidak sepenuhnya berpihak pada salah satu kekuatan global, tetapi tetap menjaga hubungan baik dengan keduanya. Indonesia, misalnya, mempertahankan kerja sama ekonomi yang erat dengan Tiongkok melalui Belt and Road Initiative (BRI), sambil menjalin hubungan pertahanan dan keamanan dengan Amerika Serikat melalui kemitraan strategis (Cheng-Chwee, 2008). Strategi hedging ini didorong oleh kebutuhan untuk menjaga stabilitas domestik, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mempertahankan otonomi kebijakan luar negeri. Negara-negara seperti Vietnam dan Malaysia juga melakukan manuver serupa dengan berhati-hati menyeimbangkan tekanan dan keuntungan dari kedua kekuatan besar (Lim & Cooper, 2015). Model ini menunjukkan bahwa dalam kondisi ketidakpastian global, pragmatisme menjadi pendekatan utama negara berkembang dalam diplomasi luar negerinya.

Diversifikasi Mitra Ekonomi dan Diplomati

Untuk menghindari ketergantungan berlebihan pada AS atau Tiongkok, banyak negara berkembang mulai mendiversifikasi mitra ekonomi dan diplomatiknya. Diversifikasi ini tampak dalam peningkatan hubungan dengan Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, India, dan bahkan negara-negara Selatan lainnya dalam kerangka kerja sama Selatan-Selatan. Misalnya, beberapa negara Afrika memperkuat hubungan perdagangan dan investasi dengan India dan Turki, di luar dominasi ekonomi Tiongkok. Diversifikasi ini juga mengarah pada peningkatan kerja sama dalam bidang teknologi, energi bersih, dan transformasi digital. Di Amerika Latin, Brasil mulai memperluas jangkauan diplomatiknya ke Asia Selatan dan negara-negara ASEAN sebagai bentuk perluasan jaringan geopolitik (Baruah, 2022). Langkah ini tidak hanya memperkuat posisi tawar negara-negara berkembang di panggung global, tetapi juga menciptakan opsi alternatif ketika terjadi tekanan dari kekuatan besar.

Peningkatan Otonomi Strategis (Strategic Autonomy)

Beberapa negara berkembang mulai menekankan pentingnya strategic autonomy sebagai pendekatan utama dalam kebijakan luar negeri. Konsep ini merujuk pada kapasitas suatu negara untuk mengambil keputusan yang independen, berdasarkan kepentingan nasional, tanpa intervensi atau tekanan eksternal. India menjadi contoh utama dari pendekatan ini, dengan terus menolak untuk secara eksplisit berpihak dalam konflik AS-Tiongkok, sembari memperkuat kemampuan industri domestik dan memperluas hubungan strategis dengan berbagai negara (Tharoor & Saran, 2020). Brasil dan Afrika Selatan juga mengedepankan narasi kebijakan luar negeri yang tidak subordinatif terhadap kekuatan global, terutama dalam forum multipolar seperti BRICS dan G20 (Acharya, 2018). Reorientasi ini mencerminkan pergeseran dari diplomasi ketergantungan ke diplomasi berbasis kapasitas nasional dan kebijakan luar negeri yang lebih asertif.

Penguatan Kerja Sama Regional

Dalam menghadapi ketidakpastian akibat ketegangan global, negara-negara berkembang memperkuat kerja sama regional sebagai bentuk solidaritas kolektif. Inisiatif seperti ASEAN Outlook on the Indo-Pacific menegaskan pentingnya kawasan

Asia Tenggara sebagai pusat perdamaian dan kerja sama di tengah rivalitas global (Anwar, 2020). Demikian pula, Afrika mempromosikan integrasi ekonomi melalui African Continental Free Trade Area (AfCFTA) sebagai upaya memperkuat perdagangan intra-Afrika dan mengurangi ketergantungan eksternal. Di Amerika Latin, CELAC (Community of Latin American and Caribbean States) mulai dihidupkan kembali sebagai forum integrasi regional untuk memperkuat posisi kawasan dalam urusan global (Riggirozzi, 2015). Kerja sama regional ini berfungsi sebagai alat kolektif untuk menegosiasikan kepentingan bersama, berbagi sumber daya, dan membentuk agenda diplomasi yang lebih otonom.

Reorientasi Fokus Kebijakan Luar Negeri ke Isu Ekonomi dan Teknologi

Seiring meningkatnya tensi ekonomi global, banyak negara berkembang mereorientasi kebijakan luar negerinya ke arah isu-isu ekonomi, infrastruktur, dan teknologi. Ketimbang hanya fokus pada isu politik dan keamanan, negara-negara ini mulai mengutamakan pencapaian pembangunan ekonomi melalui diplomasi ekonomi. Tiongkok menawarkan pembiayaan besar melalui BRI untuk pembangunan infrastruktur, sementara AS mendorong kerja sama digital dan tata kelola yang transparan melalui Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) (Stiglitz, 2017). Negara-negara seperti Ethiopia, Pakistan, dan Filipina memanfaatkan kedua sumber ini secara selektif untuk meningkatkan konektivitas dan modernisasi ekonomi domestik. Fokus baru ini mencerminkan pergeseran diplomasi dari ideologis ke pragmatis yang didasarkan pada kebutuhan pembangunan nasional (Baldwin, 2016).

Adaptasi Narasi Diplomasi yang Fleksibel

Negara berkembang juga mulai membangun narasi diplomasi yang lebih fleksibel untuk mengatasi tekanan geopolitik. Di Indonesia, misalnya, prinsip “bebas aktif” diperkuat kembali sebagai kerangka normatif dalam merespons rivalitas global tanpa berpihak (Goh, 2005). India mengembangkan konsep “non-alignment 2.0” yang berupaya mempertahankan independensi kebijakan luar negeri dengan tetap membuka ruang kerja sama luas. Filipina, meskipun memiliki perjanjian keamanan dengan AS, juga memperkuat kerja sama ekonomi dengan Tiongkok untuk kepentingan domestiknya, yang disebut sebagai strategi “strategic equilibrium”. Narasi fleksibel ini membantu negara berkembang menghindari jebakan dikotomis dan menciptakan ruang gerak yang lebih dinamis dalam pengambilan keputusan luar negeri (Nye, 2020).

Peningkatan Kapasitas Diplomatik dan Intelijen Ekonomi

Sebagai bagian dari upaya reorientasi, negara berkembang juga memperkuat kelembagaan diplomatik, terutama dalam hal analisis kebijakan luar negeri dan pemetaan kepentingan ekonomi global. Negara-negara seperti Vietnam dan Kolombia mengembangkan think-tank kebijakan luar negeri dan lembaga riset strategi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (Murphy, 2017). Selain itu, beberapa negara mulai meningkatkan kapasitas intelijen ekonomi untuk mengantisipasi tekanan sanksi, perubahan tarif, atau gangguan pasokan global. Dengan dukungan kelembagaan yang lebih baik, negara berkembang memiliki posisi

yang lebih kuat dalam merespons dinamika global secara adaptif dan proaktif (Ikenberry, 2020).

KESIMPULAN

Ketegangan ekonomi antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah menciptakan dilema strategis bagi negara-negara berkembang dalam merumuskan kebijakan luar negeri mereka. Ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok dan komitmen keamanan dengan Amerika Serikat memaksa negara-negara ini untuk mencari keseimbangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga aman secara geopolitik. Dalam konteks tersebut, strategi hedging, diversifikasi kemitraan internasional, serta adopsi kebijakan luar negeri yang fleksibel menjadi pendekatan dominan yang digunakan.

Temuan dalam studi ini menunjukkan bahwa negara berkembang tidak lagi menjadi objek pasif dalam dinamika geopolitik global, melainkan menjadi aktor yang aktif dan adaptif dalam mengelola kepentingan nasionalnya. Pendekatan seperti penguatan kerja sama regional, penekanan pada strategic autonomy, dan peningkatan kapasitas diplomasi menjadi indikator transformasi peran negara berkembang dalam sistem internasional multipolar. Reorientasi fokus dari isu politik ke ekonomi dan teknologi juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma diplomasi luar negeri ke arah yang lebih pragmatis dan berorientasi hasil.

Namun demikian, dinamika hubungan internasional yang terus berkembang, terutama dalam konteks perang dagang, perkembangan teknologi strategis, dan aliansi keamanan baru, menuntut negara-negara berkembang untuk terus beradaptasi. Reorientasi ini bukanlah kebijakan sekali jadi, melainkan proses berkelanjutan yang harus dikelola secara cermat dan konsisten. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kapasitas kelembagaan dan dinamika domestik yang mempengaruhi formulasi kebijakan luar negeri di tiap negara.

Rekomendasi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi kasus mendalam terhadap beberapa negara berkembang secara individual, guna menggambarkan bagaimana faktor domestik—seperti kepemimpinan politik, opini publik, kekuatan ekonomi, dan struktur birokrasi—berperan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri mereka. Pendekatan ini akan memberikan wawasan lebih rinci tentang variasi strategi reorientasi antarnegara. Selain itu, analisis jaringan diplomatik dan kerja sama transnasional berbasis data kuantitatif juga dapat dikembangkan untuk memahami pola-pola aliansi baru dan perubahan struktur pengaruh dalam hubungan internasional pasca ketegangan AS–Tiongkok.

Bibliography

- Acharya, A. (2018). *The end of American world order*.
Anwar, D. F. (2020). Indonesia and the ASEAN outlook on the Indo-Pacific. *International Affairs*, 96(1), 111–129.
Baldwin, D. A. (2016). *Power and international relations: A conceptual approach*.
Baruah, D. M. (2022). *India in the Indo-Pacific: New Delhi's Theater of Opportunity*.

- Carnegie Endowment for International Peace.
- Baylis, J., Smith, S., & Owens, P. (2020). *The globalization of world politics: An introduction to international relations*. Oxford university press, USA.
- Booth, W. C., Colomb, G. G., Williams, J. M., Bizup, J., & FitzGerald, W. T. (2003). *The craft of research (Chicago guides to writing, editing, and publishing)*. University of Chicago press.
- Cheng-Chwee, K. (2008). The essence of hedging: Malaysia and Singapore's response to a rising China. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 30(2), 159–185.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Diptyana, P., Rokhmania, N., & Herlina, E. (2022). Financial Literacy, Digital Literacy and Financing Preferences Role to Micro and Small Enterprises' Performance. *IJEBD (International Journal of Entrepreneurship and Business Development)*, 5(2), 346–358. <https://doi.org/10.29138/ijebd.v5i2.1785>
- Evenett, S. J., & Fritz, J. (2019). *Going it Alone?: Trade Policy After Three Years of Populism*. Centre for Economic Policy Research.
- Friedberg, A. L. (2022). *Getting China Wrong*. John Wiley & Sons.
- Goh, E. (2005). *Great powers and Southeast Asian regional security strategies: omnimeshment, balancing and hierarchical order*.
- Haass, R. (2021). *The world: A brief introduction*. Penguin.
- Ikenberry, G. J. (2020). *A world safe for democracy: Liberal internationalism and the crises of global order*. Yale University Press.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology*. Sage publications.
- Kurecic, P. (2017). Small states in the multi-polar world: Introduction. *World Review of Political Economy*, 8(3), 280–294.
- Kurlantzick, J. (2016). *State capitalism: How the return of statism is transforming the world*. Oxford University Press.
- Lim, D. J., & Cooper, Z. (2015). Reassessing hedging: The logic of alignment in East Asia. *Security Studies*, 24(4), 696–727.
- MacDougall, J. C. (2017). Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap? *The US Army War College Quarterly: Parameters*, 47(2), 13.
- Murphy, A. M. (2017). Great power rivalries, domestic politics and Southeast Asian foreign policy: Exploring the linkages. In *Asian Security* (Vol. 13, Issue 3, pp. 165–182). Taylor & Francis.
- Nye, J. S. (2020). *Do morals matter?: Presidents and foreign policy from Nye, J. S. (2020). Do morals matter?: Presidents and foreign policy from FDR to Trump*. Oxford University Press. *FDR to Trump*. Oxford University Press.
- Reilly, J. (2013). *China's economic statecraft: turning wealth into power*.
- Ridder, H.-G. (2014). *Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook 3rd Edition*. JSTOR.
- Riggiozzi, P. (2015). The social turn and contentious politics in Latin American post-neoliberal regionalism. *The Legitimacy of Regional Integration in Europe and the Americas*, 229–248.

Asep Setiawan

Reorientasi Kebijakan Luar Negeri Negara Berkembang dalam Menyikapi Ketegangan Ekonomi antara Amerika Serikat dan Tiongkok

Stiglitz, J. E. (2017). *Globalization and its discontents revisited: Anti-globalization in the era of Trump*. WW Norton & Company.

Tharoor, S., & Saran, S. (2020). *The new world disorder and the Indian imperative*. Aleph New Delhi.

Zakaria, F. (2020). *Ten lessons for a post-pandemic world*. Penguin UK.

Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.